

**PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK No 69/PUU-
XIII/2015**

(studi terhadap Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu
Hukum**



Oleh :

JANUAR SURYO PRABOWO

17.02.51.0053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

2021

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN
SKRIPSI



Saya, Januar Suryo Prabowo, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 (studi terhadap Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby) Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

(Januar Suryo P)

NIM : 17.02.51.0053

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 29 Juli 2021

(Adi Suliantoro S.H.,M.H)

NIDN : 0608026501

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul ;
**Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 (studi
terhadap Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby)**
Ditulis oleh :

NIM : 17.02.51.0053

Nama : januar Suryo Prabowo

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 29 Juli 2021

Ketua

(Adi Suliantoro S.H.,M.H.)

NIDN : 0606026501

Sekretaris

(Fitika Andraini S.H., M.Kn.)

NIDN : 0607127202

Anggota

(Arikha Saputra S.H., M.H.)

NIDN : 0616059103

Mengetahui,

Unuversitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Rochmani, SH., M.Hum)

NIDN : YU.2.03.04.061

HALAMAN MOTTO

“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda.” (Albert Einstein) “Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan.” (Jaya Setiabudi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Sujud syukur hamba kepada engkau ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Atas ridhому dan izinmu hamba dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berpikir, bersabar dan berilmu. Semoga keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini adalah langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih kesuksesan amin.
2. Dengan ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga yaitu Ayahanda dan Ibunda saya. Keduanya lah yang membuat saya bisa sampai dalam tahap skripsi ini yang mana akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang tidak ada hentinya untuk saya. Terimakasih juga untuk kakak saya selalu mensupport.
3. Terimakasih juga untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Adi Suliantoro dalam melayani saya mengerjakan skripsi ini dan dengan telitinya beliau mengoreksi setiap skripsi saya. Terimakasih bapak Adi saya sudah dibantu, diberi arahan sehingga saya sampai di titik ini.
4. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih untuk seluruh teman-teman saya di fakultas Hukum angkatan 2017 telah memberikan memori yang tidak akan saya lupakan. Sehingga kuliah 4 tahun ini menjadi berwarna meskipun ada pandemi Covid-19. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat saya yaitu De buddies, selalu menyemangati dan mendukung dalam skripsi ini. Dan yang sering saya panggil mamak yaitu Mia Nur Haslinda terimakasih juga sudah menjadi teman akrab saya selama di kampus. Saya doakan agar kesuksesan ada dalam diri kita semua amin.

Prabowo, Suryo. Januar. PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK No 69/PUU-XIII/2015 (STUDI TERHADAP PENETAPAN PN SURABAYA No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby). Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Adi Suliantoro S.H.,M.H. FH-UNISBANK Semarang.

ABSTRAK

Ketertarikan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak, kerawanan yuridis dan solusi. apa saja yang ditimbulkan dari Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 terhadap Penetapan PN. Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby untuk itu pembahasan ini menarik bagi penulis.

Permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kasus posisi dari Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (2) Bagaimanakah dampak dari Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 terhadap Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (3) Adakah kerawanan yuridis yang ditimbulkan akibat dari Penetapan PN tersebut (4) Bagaimanakah solusi dari kerawanan yuridis tersebut

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dimana yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, data primer dan tersier. setelah data dari sumber yang dituju sudah terkumpul semuanya maka selanjutnya akan dilakukan analisis.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK No 69/PUU-XIII/2015, dapat dilakukan pada waktu, sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015. Dampak Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 terhadap Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby adalah dalam amar penetapannya mengabulkan permohonan perjanjian kawin yang di buat setelah perkawinan dilangsungkan. Dimana Pemohon I Probo Suroto dan Pemohon II Bijie Li tujuan para Pemohon adalah agar Perjanjian Pemisahan Harta dan dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik.

Kerawanan yuridis Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby yang mengabulkan permohonan penetapan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung adalah sepanjang belum ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara pencatatan kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku terhadap para pihak yang membuat perjanjian kawin. Solusinya adalah segera dibuat ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Kata kunci : Perjanjian Perkawinan setelah Putusan No 69/PUU-XII/2015

ABSTARCT

The interest of this research is to find out the impact, juridical vulnerabilities and solutions. what are the consequences of the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015 on the determination of the PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby, for this reason, this discussion is interesting for the author.

The results obtained from this study are (1) How is the case of the position of the PN Determination. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (2) What is the impact of the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015 on the determination of the PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (3) Are there any juridical vulnerabilities caused by the determination of the PN (4) What is the solution to the juridical vulnerabilities

This research uses normative juridical research type. Where juridical normative is a type of legal research conducted by examining library materials which are secondary data, primary and tertiary data. After all the data from the intended source has been collected, then the next analysis will be carried out.

The implementation of making a marriage agreement in Law Number 1 of 1974 concerning marriage after the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015, can be done at the time, before or during the marriage bond. This is regulated in Article 29 of the Marriage Law jo. Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. Impact of the Constitutional Court's Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the Determination of PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby is in the decree granting the request for a marriage agreement made after the marriage took place. Where Petitioner I Probo Suroto and Petitioner Ii Bijie Li, the purpose of the Petitioners is for a Separation of Assets

Agreement and they can own land with Hak Milik status. Juridical Vulnerability Determination of PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby which grants the application for the determination of a marriage agreement made after the marriage takes place is that as long as there is no statutory provision governing the procedure for recording a marriage made after the marriage takes place, the marriage agreement cannot bind a third party. and only applies to the parties to the marriage agreement. The solution is to immediately make provisions for laws and regulations that regulate the procedure for recording marriage agreements made after the marriage takes place.

Keywords : Marriage Agreement after Decision No. 69/PUU-XII/2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berka, rahmat, dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“PERJANJIAN PERKAWIAN SETELAH PUTUSAN MK No 69/PUUXIII/2015 (studi terhadap Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby)”

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Safik Faozi, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak Dr. Rochmani, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Bapak Adi Suliantoro, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan Dosen Pembimbing.
4. Ayahanda dan Ibunda, Hariono dan Karyanti Sri Sawarni yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tepat waktu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon agar memberikan kritik dan saran.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 29 juli 2021

Penyusun

Jnauar Suryo Prabowo

2.1.3	Bentuk Perjanjian Perkawinan	15
2.1.4	Syarat Sahnya Perjanjian Kawin.....	16
2.2	Tinjauan Khusus	18
2.2.1	Isi Perjanjian Kawin.....	18
2.2.2	Syarat-Syarat Perjanjian Kawin	19
2.2.3	Macam-Macam Perjanjian Perkawinan	20
2.2.4	Waktu untuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan	20
2.2.5	Perubahan isi Perjanjian Perkawinan	23
2.2.6	Masa Berlaku Perjanjian Kawin	25
2.2.7	Akibat Perjanjian Kawin	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Tipe Penelitian	28
3.2	Spesifikasi Penelitian	28
3.3	Sumber Data	29
3.4	Metode Pengumpulan Data	29
3.5	Metode Penyajian Data.....	30
3.6	Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN		32
1.1	Hasil Penelitian.....	32
4.1.1.	Dampak dari Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 terhadap Penetapan PN Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby	40

4.1.2. Kerawanan yuridis yang ditimbulkan akibat dari Penetapan PN No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby	47
4.1.3. Solusi dari kerawanan yuridis Penetapan PN No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby	48
1.2 Hasil Analisa.....	48
1.2.1 Analisa Dampak dari Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 terhadap Penetapan PN Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby....	53
1.2.2 Analisa Kerawanan yuridis yang ditimbulkan akibat dari Penetapan PN No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby	58
1.2.3 Analisa Solusi dari kerawanan yuridis Penetapan PN No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby	62
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68